

**HUBUNGAN KEPEMIMPINAN LURAH DENGAN  
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN FISIK DI KELURAHAN  
BUKUAN KECAMATAN PALARAN KOTA SAMARINDA**

**Zaenal Arifin<sup>1</sup>**

**eJournal Ilmu Administrasi Negara  
Volume 1, Nomor 2, 2013**

## HUBUNGAN KEPEMIMPINAN LURAH DENGAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN FISIK DI KELURAHAN BUKUAN KECAMATAN PALARAN KOTA SAMARINDA

Zaenal Arifin<sup>1</sup>

### Abstrak

**Zaenal Arifin.** Hubungan Kepemimpinan Lurah Dengan Penyelenggaraan Pembangunan Fisik di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Di bawah bimbingan Bapak Drs. Heryono Susilo Utomo, M.Si dan Hj. Hariati, S.Sos.,M.Si. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Hubungan Kepemimpinan Lurah Dengan Penyelenggaraan Pembangunan Fisik di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, dokumentasi dan angket. Sumber data yang digunakan yaitu proportionate stratified random sampling. Untuk menganalisis data dan pengujian, dipergunakan analisis Korelasi Rank Spearman. Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis diketahui bahwa kedua variabel yaitu kepemimpinan Lurah (x) dan penyelenggaraan pembangunan fisik (y) memperoleh nilai empiris 0,466 sedangkan harga  $r_s$  tabel untuk jumlah responden 50 adalah sebesar 0,279 dengan tingkat signifikansi 0,05 atau pada tingkat 95 % berdasarkan tes satu sisi. Sehingga akan terlihat bahwa harga empiris lebih besar dari  $r_s$  tabel yakni  $0,466 > 0,279$  maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Dengan demikian terdapat korelasi atau hubungan signifikan antara kepemimpinan Lurah dengan penyelenggaraan pembangunan fisik di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda.

**Kata Kunci :** Kepemimpinan Lurah, Penyelenggaraan Pembangunan Fisik, Rank Spearman.

### Pendahuluan

#### Latar Belakang

Dalam era reformasi dewasa ini kepemimpinan mempunyai peranan yang strategis dan menentukan didalam membawa masyarakat kearah kemajuan dan kesejahteraan lahir dan batin. Tidak sedikit kegagalan organisasi disebabkan karena kepemimpinan yang kurang efektif dan ini tidak hanya berlaku dikalangan organisasi pemerintah semata, akan tetapi <sup>1</sup>juga pada kalangan dunia usaha. Apalagi pembangunan sekarang semakin kompleks atau mencakup berbagai aspek, baik dibidang politik, sosial, ekonomi, hukum dan lain-lain justru diperlukan kehadiran pemimpin yang mampu menjalankan kepemimpinannya dengan baik dan peka terhadap tuntutan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail: zapin17@gmail.com.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan selanjutnya mengalami perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, yang menjelaskan bahwa daerah Kota dan Kabupaten mempunyai perangkat yaitu Kecamatan yang dipimpin oleh Camat dalam tugasnya yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota atau Bupati, di dalam Kecamatan juga mempunyai perangkat yaitu Kelurahan yang dipimpin oleh Lurah sebagai penerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat.

Berdasarkan Perda Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kelurahan pada pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan”. Kemudian lebih diperjelas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan berbunyi “yang dimaksud dengan urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, irigasi, pasar atau sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah”.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya seperti halnya urusan pembangunan maka seorang Lurah dituntut untuk mampu menciptakan visi dan rasa komunitas serta membantu mengembangkan komitmen dengan mitra kerjanya agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu dengan cara menjalankan fungsi–fungsi manajemen yang juga merupakan fungsi dari kepemimpinan itu sendiri, fungsi manajemen yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan.

Didalam pelaksanaan otonomi daerah, Kelurahan merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut (pengaturan mengenai kelurahan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 pasal 127). Hal ini berarti bahwa pembangunan Kelurahan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan regional atau daerah dan merupakan unsur pokok dalam sistem pembangunan Indonesia.

Agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik serta untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan ini, maka Lurah sebagai kepala Kelurahan memegang peranan yang menentukan. Sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, ia harus mampu mengkoordinasikan tugas-tugas pokoknya baik dengan Camat maupun instansi vertikal yang berada diwilayah kerjanya mengenai tugas yang dibebankan kepadanya yang saling kait–mengkait, termasuk tugas pembangunan yang multi dimensional.

Mengingat pentingnya kepemimpinan seorang Lurah dalam penyelenggaraan pembangunan di Kelurahan, maka penulis mencoba melakukan penelitian di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan bahwa pembangunan

yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kelurahan masih belum optimal, kurangnya kemampuan Lurah dalam menjalankan kepemimpinannya untuk melakukan perubahan-perubahan meningkatkan hasil pembangunan sehingga pembangunan belum seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat, hal ini dapat dilihat dengan masih adanya jalan-jalan yang rusak, prasarana drainase yang tidak layak sehingga sering mengakibatkan banjir karena tidak mampu menampung debit air dan kondisi sarana kesehatan seperti posyandu yang belum sesuai standar seharusnya.

Kepemimpinan juga merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kaitannya dengan suatu organisasi. Oleh karena itu, suksesnya pembangunan di suatu daerah juga ditentukan oleh kualitas atau kinerja kepemimpinan Lurah dalam mempertanggungjawabkan kewenangan yang diberikan kepada atasannya dalam hal ini adalah Camat. Bertitik tolak dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat Kelurahan, terutama di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda maka penulis bermaksud mengangkat judul “Hubungan Kepemimpinan Lurah Dengan Penyelenggaraan Pembangunan Fisik di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda”.

## **Kerangka Dasar Teori Kepemimpinan**

Kepemimpinan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kaitannya dengan suatu organisasi, dimana keberhasilan suatu organisasi ini sangat ditentukan atau sangat tergantung pada diri seorang pemimpin, karena seorang pemimpin inilah yang akan membuat suatu perencanaan, menentukan strategi yang tepat, serta membimbing, mengarahkan dan menggerakkan orang-orang yang dipimpinya di dalam rangka mencapai tujuan organisasi atau tujuan bersama.

“Kepemimpinan sering didefinisikan sebagai proses membuat orang lain terinspirasi untuk bekerja keras dalam menyelenggarakan tugas-tugas penting” (Schermerhorn, dalam Dwiyanto, 2009: 219). Akan tetapi pengertian tersebut sering dikaitkan dengan dasar-dasar bagi kepemimpinan yang efektif, yakni mendasarkannya pada cara seorang pemimpin atau manajer menggunakan *power* untuk mempengaruhi perilaku orang lain. “Power merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang lain untuk melakukan sesuatu seperti yang diinginkan oleh seseorang yang menghendaknya” (Kanter, dalam Dwiyanto, 2009: 219). Karena itulah seringkali “kepemimpinan atau leadership didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu” (Robbins, dalam Dwiyanto, 2009: 219).

Dari berbagai pengertian diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwasannya kepemimpinan merupakan suatu upaya dari seorang pemimpin untuk dapat merealisasikan tujuan organisasi melalui orang lain atau bawahan dengan cara memberikan motivasi agar orang lain tersebut mau melaksanakannya, dan untuk itu diperlukan adanya keseimbangan antara

kebutuhan individu para pelaksana dengan tujuan perusahaan atau organisasi. Kepemimpinan sangat diperlukan agar semua sumberdaya yang telah diorganisasikan dapat digerakkan untuk merealisasikan tujuan organisasi.

### **Fungsi Kepemimpinan**

Kepemimpinan merupakan aspek penting dalam organisasi khususnya dalam lingkup administrasi pemerintahan daerah. Hal ini ditunjang oleh pendapat Misumi (dalam Kaloh, 2009: 12) mengatakan, “kepemimpinan merupakan subyek penting di dalam manajemen dan ilmu administrasi karena kepemimpinan terkait dengan saling hubungan antara atasan dan bawahan di dalam organisasi. Baik organisasi maupun kepemimpinan keduanya merupakan unsur administrasi”. Kepemimpinan lebih erat kaitannya dengan fungsi penggerakan (*actuating*) dalam manajemen. Fungsi penggerakan mencakup kegiatan memotivasi, kepemimpinan, komunikasi, pelatihan, dan bentuk-bentuk pengaruh pribadi lainnya. Empat fungsi tersebut juga dianggap sebagai tindakan mengambil inisiatif dan mengarahkan pekerjaan yang perlu dilaksanakan dalam sebuah organisasi.

Dengan demikian *actuating* sangat erat kaitannya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan agar tujuan-tujuan organisasi dapat dicapai seperti yang diinginkan. Hal senada juga diungkapkan oleh Pamudji (1995: 08) menyatakan bahwa “kepemimpinan adalah salah satu sarana dalam menggerakkan (*actuating*) dan yang terakhir adalah salah satu fungsi manajemen (*management*), sehingga wajarlah apabila kepemimpinan itu harus dipelajari oleh para pejabat pimpinan (*managers*)”.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa fungsi manajemen juga merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin didalam menjalankan kepemimpinannya untuk merealisasikan tugas-tugas pokoknya.

Menurut G.R. Terry (dalam Syafi'ie, 1993: 166) ada 4 (empat) fungsi manajemen yang juga merupakan fungsi kepemimpinan yaitu:

- a. Perencanaan (*Planning*)
- b. Pengorganisasian (*Organizing*)
- c. Penggerakkan (*Actuating*)
- d. Pengawasan (*Controlling*)

### **Gaya Kepemimpinan**

Seorang pemimpin harus mampu melihat dan memahami orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Dengan menggunakan pengetahuannya tentang hubungan manusia dalam kelompoknya. Seorang pemimpin akan dapat melihat gambaran tentang motif-motif seseorang untuk lebih giat lagi melaksanakan tugasnya. Kegiatan memberi motivasi tersebut tidak akan berhasil apabila pemimpin tidak memiliki cara-cara tertentu untuk melaksanakannya. Cara-cara tertentu inilah yang secara umum disebut dengan gaya. Karena itulah gaya kepemimpinan dapat di lihat dari bagaimana cara

membawakan diri sebagai seorang pemimpin dalam menggunakan kekuasaannya.

Menurut Rivai (2003: 64) yang dimaksud gaya kepemimpinan adalah, “sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin”.

Selanjutnya Yeremias (2004: 94) ada beberapa gaya kepemimpinan, diantaranya:

1. Gaya kepemimpinan yang otokrasi
2. Gaya kepemimpinan demokratis
3. Gaya kebebasan (*laissez faire*)

Pengertian diatas memberikan penjelasan bahwa gaya kepemimpinan merupakan perilaku dan strategi sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap, yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya. Gaya kepemimpinan menggambarkan kombinasi yang konsisiten dari falsafah, keterampilan, sifat dan sikap yang mendasari prilaku seseorang. Gaya kepemimpinan yang menunjukkan secara langsung, tentang keyakinan seorang pimpinan terhadap kemampuan bawahannya. Artinya gaya kepemimpinan adalah prilaku dan sebagai hasil strategi, sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya atau pegawai.

### **Kepemimpinan Lurah**

Dalam konteks pemerintahan Indonesia, sebuah Kelurahan dipimpin oleh Lurah, sedang desa dipimpin oleh Kepala Desa. Tentu saja keduanya berbeda, karena Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertanggungjawab kepada Camat, sedang Kepala Desa bisa dijabat oleh siapa saja yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, dan dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin, yang berarti seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan disuatu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi tercapainya suatu maksud dan tujuan bersama. Menurut Robbins (dalam Dwiyanto, 2009: 219) mengatakan, “Kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu”.

Maksudnya, kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerja sama dan kerja kelompok, perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang di didalam maupun luar kelompok atau organisasi.

Sedangkan definisi Lurah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kelurahan pada pasal 1 ayat (13), yang berbunyi “Lurah adalah Kepala Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan pada Kota Samarinda”. Mengenai tugas-tugas pokok Lurah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kelurahan pada pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan”. Selain itu, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Perda Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kelurahan Pasal 4 ayat (1), maka pada pasal 5 ayat (1) Lurah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Dalam hal pelimpahan tugas dari Walikota kepada Lurah, maka pemerintah Kota perlu memverifikasi tugas-tugas yang dilimpahkan secara proporsional. Pelaksanaan tugas Lurah akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber keuangan yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan tuntutan kebutuhan masyarakat Kota.

Adapun mengenai hubungan kepemimpinan Lurah dengan penyelenggaraan pembangunan dikategorikan sebagai kepemimpinan yang berorientasi pada tugas atau urusan yang dilimpahkan oleh Bupati atau Walikota, dikarenakan kepemimpinan Lurah merupakan kewenangan yang merupakan bagian dari sistem peranan formal. Kewenangan tersebut merupakan kekuasaan legitimasi. Artinya, kekuasaan yang melekat pada jabatan tersebut untuk meyakinkan bahwa individu yang berada dalam jabatan dibawahnya telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang ada.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Kepemimpinan Lurah merupakan suatu kemampuan yang dimiliki Lurah dalam memotivasi ataupun mempengaruhi bawahannya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang dilimpahkan oleh Bupati atau Walikota.

## **Pembangunan**

Jika kita mendengar kata pembangunan maka yang terlintas dalam pikiran kita adalah suatu perubahan akan terjadi, yaitu dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang ada berubah menjadi atau berganti dengan yang baru. Menurut Bachtiar Effendi (2002: 09) menyatakan bahwa, “pembangunan suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara

terencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna, dan hasil guna yang merata dan berkeadilan”.

Selanjutnya pembangunan menurut Siagian (2008: 02) “adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara atau bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”.

Definisi di atas memberikan penjelasan bahwa pembangunan merupakan proses perubahan yang dilakukan secara sadar oleh bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas yakni cara hidup lebih baik dari pada yang sebelumnya mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada dasarnya pembangunan itu adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki. Selain itu suatu pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan atau perubahan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan atau perubahan dan pertumbuhan atau perubahan sendiri akan terjadi sebagai akibat dari adanya suatu pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan atau perubahan dapat berupa pengembangan atau perluasan (*expansion*) dan peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

### **Pembangunan Fisik**

Pembangunan fisik merupakan pembangunan yang dilaksanakan dalam bentuk fisik, yang berwujud nyata dan bisa dilihat secara kasat mata dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat setempat seperti halnya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan yang meliputi: jalan, drainase, gedung sekolah, puskesmas, dan gedung serbaguna.

Berdasarkan Perda Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kelurahan pada pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan”. Kemudian lebih diperjelas oleh penjabaran yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 pasal 4 berbunyi “yang dimaksud dengan urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, irigasi, maupun pasar, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah”.

Selanjutnya menurut Mashoed (2004: 12-13) yang mengatakan bahwa pembangunan fisik merupakan, “program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan perbaikan fisik lingkungan (sarana dan prasarana) pemukiman kampung, meliputi antara lain perbaikan jalan lingkungan, saluran drainase, Gedung serbaguna, sarana kesehatan dan pendidikan”.

Pembangunan Fisik dapat dipahami sebagai sebuah proses pemenuhan kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti jalan, sanitasi, pengangkutan umum dan kesehatan, fasilitas-fasilitas pendidikan, kebudayaan



serta keagamaan. Pembangunan fisik dapat berupa kebutuhan akan prasarana yang relatif bersifat jangka panjang serta tetap seperti jalan dan bangunan, juga keperluan masyarakat akan sarana yang cenderung bersifat jangka pendek dan dinamis seperti air minum dan alat angkut yang diusahakan secara mandiri.

“Infrastruktur atau sarana dan prasarana diartikan sebagai fasilitas fisik suatu kota atau negara yang disebut pekerjaan umum” (Grigg dalam Nugroho, 2003: 105). Definisi tersebut juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman bahwa “Prasarana diartikan sebagai kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan, kawasan, kota atau wilayah (*spatial space*) sehingga memungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya sedangkan komponen-komponennya adalah jalan, air bersih, pembuangan sampah, drainase, sanitasi, listrik dan telepon. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya”.

Dengan demikian merujuk beberapa uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pembangunan fisik (sarana dan prasarana) Kelurahan merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan system ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Kelurahan, yang didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Pentingnya sarana dan prasara dalam setiap aspek karena sarana prasarana merupakan penunjang untuk mencapai tujuan, sarana prasarana memiliki hubungan dan sulit untuk dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang kompleks walaupun antara sarana dan prasarana memiliki perbedaan, keterkaitan keduanya memiliki peran penting untuk terselenggaranya baik fungsi maupun tujuan suatu kegiatan baik yang telah direncanakan maupun yang belum direncanakan.

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian didalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian survey asosiatif. Penelitian survey asosiatif adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok serta bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

## **Populasi dan sampel**

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka yang menjadi populasi adalah kepala keluarga dari latar belakang pendidikan berstrata yang ada di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Kemudian yang dijadikan responden dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus maka dihasilkan sampel sejumlah 44 orang dari 4.490 orang kepala keluarga selanjutnya

ditambah dengan 6 orang pegawai Kelurahan. Jadi jumlah sampel keseluruhan sebanyak 50 orang.

### **Definisi Konsepsional**

Dari penjelasan diatas dan sesuai dengan judul skripsi penulis ini maka ada dua konsep pokok yang dirumuskan yaitu:

#### 1. Kepemimpinan Lurah

Merupakan suatu kapasitas seseorang yang mempunyai kemampuan atau hak untuk mengarahkan, membimbing, atau mendorong orang lain untuk melakukan segala sesuatu yang merupakan kebijaksanaan atau perintah untuk tujuan tertentu.

#### 2. Penyelenggaraan Pembangunan Fisik

Merupakan proses perubahan fisik atau sarana dan prasarana Kelurahan yang berlangsung secara terus menerus menuju kearah yang lebih baik, yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan bersama dengan masyarakatnya, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **Definisi Operasional**

Berdasarkan pendapat diatas yang berhubungan dengan kepemimpinan dengan penyelenggaraan pembangunan fisik maka perumusan indikator-indikator yang dipergunakan untuk mengukur variabel yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Variabel Kepemimpinan Lurah (*Independent variable*) dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen, indikatornya adalah:
  - a. Perencanaan (*Planning*)
  - b. Pengorganisasian (*Organizing*)
  - c. Penggerakkan (*Actuating*)
  - d. Pengawasan (*Controlling*)
2. Variabel Penyelenggaraan Pembangunan Fisik (*Dependent variable*), indikatornya adalah:
  - a. sarana kesehatan
  - b. sarana pendidikan
  - c. sarana gedung serbaguna
  - d. prasarana jalan
  - e. prasarana drainase

### **Hasil Penelitian**

Penyajian data dilakukan untuk memberikan gambaran data dari jawaban responden yang di peroleh dari hasil penelitian, yaitu Hubungan Kepemimpinan Lurah Dengan Penyelenggaraan Pembangunan Fisik di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda sebagai berikut:

## **Kepemimpinan Lurah Dengan Penyelenggaraan Pembangunan Fisik (Variabel X dan Y)**

Untuk mengukur Variabel Kepemimpinan Lurah digunakan empat indikator yaitu: Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Penggerakkan (*Actuating*) dan Pengawasan (*Controlling*). Kemudian Untuk mengukur variabel Penyelenggaraan Pembangunan di gunakan lima indikator yaitu: sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana gedung serbaguna, prasarana jalan dan prasarana drainase yang semuanya di jabarkan dalam beberapa pertanyaan.

Berdasarkan analisis yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Dari analisis data dan pengujian hipotesis diketahui bahwa kedua variabel yaitu kepemimpinan Lurah (x) dan penyelenggaraan pembangunan fisik (y) memperoleh nilai empiris 0,466 sedangkan harga  $r_s$  tabel untuk jumlah responden 50 adalah sebesar 0,279 dengan tingkat signifikansi 0,05 atau pada tingkat 95 % berdasarkan tes satu sisi. Sehingga akan terlihat bahwa harga empiris lebih besar dari  $r_s$  tabel yakni  $0,466 > 0,279$  maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Dengan demikian terdapat korelasi atau hubungan antara kepemimpinan Lurah dengan penyelenggaraan pembangunan fisik di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis ternyata kepemimpinan Lurah di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda, memiliki hubungan yang signifikan dengan penyelenggaraan pembangunan fisik.
3. Hubungan Kepemimpinan Lurah Dengan Penyelenggaraan Pembangunan di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda menunjukkan angka yang positif dengan nilai  $r_s$  sebesar 0,466 dimana nilai tersebut termasuk dalam kategori sedang.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Setelah penulis melakukan penelitian dilapangan dan menganalisa data-data hasil penelitian, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa besar hubungan kepemimpinan Lurah dengan penyelenggaraan pembangunan fisik adalah  $r_{s\ hit} > r_{s\ tab}$  ( $0,466 > 0,279$ ), yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kepemimpinan Lurah dengan penyelenggaraan pembangunan fisik sehingga hipotesis alternative ( $H_a$ ) diterima dan hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa Kepemimpinan di kantor Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda masih terdapat indikator yang mempengaruhi ketidaktepatan dalam hal kepemimpinan Lurah terutama yakni pada indikator pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan yang diambil Lurah masih belum sepenuhnya mewakili kebutuhan seluruh komponen masyarakat, akan tetapi secara keseluruhan pada variabel kepemimpinan Lurah sudah cukup baik,

sedangkan pada hasil penelitian dan analisis data pada faktor penyelenggaraan pembangunan fisik di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda terutama pada indikator pembangunan sarana jalan dan drainase masih terdapat beberapa kondisi sarana yang belum layak sehingga pelaksanaan pembangunan seakan belum berjalan secara merata, akan tetapi secara keseluruhan pada variabel penyelenggaraan pembangunan fisik sudah cukup baik.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat menyampaikan saran-saran yang mungkin berguna demi lebih meningkatkan kepemimpinan Lurah dengan penyelenggaraan pembangunan fisik di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda yaitu sebagai berikut:

1. Dalam pengambilan keputusan sebaiknya pemimpin mau menerima keluhan maupun aspirasi-aspirasi masyarakat dan bawahannya (pegawai Kelurahan) terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan fisik.
2. Untuk meningkatkan penyelenggaraan pembangunan di Kelurahan Bukuan sebaiknya Lurah harus lebih aktif untuk terjun langsung mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik.
3. Agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien serta lebih merata sebaiknya Lurah harus lebih aktif untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang berlangsung.
4. Sebaiknya seorang pemimpin lebih meningkatkan koordinasinya dengan Camat maupun instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya mengenai tugas yang dibebankan kepadanya agar pembangunan fisik tersebut dapat berjalan secara merata keseluruh kampung yang ada di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dwiyanto, Agus. 2009. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom*. Jakarta: Uhaiindo.
- Kaloh, J. 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Keban, Yeremias T. 2004. *Memahami Good Government dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mashoed. 2004. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Surabaya: Papyrus.
- Nugroho, Iwan dan Rochmin Dahuri. 2003. *Pembangunan Wilayah*. Malang: Pustaka LP3ES.
- Pamudji, S. 1995. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rivai, V. dan Mulyadi, D. 2003. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Siagian, Sondang P. 2008. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.  
Syafi'ie, Inu Kencana. 1993. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

**Dokumen-Dokumen :**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.  
Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2009 *Tentang Kelurahan*.  
Peraturan Pemerintah Kota Samarinda Nomor 73 Tahun 2005 *Tentang Kelurahan*.  
Undang-undang Nomor 04 Tahun 1992 *Tentang Perumahan dan Pemukiman*.

**Sumber Internet :**

Rasyid, Nasrudin. 2010. Konsep Sarana dan Prasarana,  
<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2106962-pengertian-sarana-dan-prasarana/#ixzz2Q2dNkdId>  
(diakses 17 Februari 2013)